

Judul : Menelisik biang kerok pupuk subsidi langka
Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 14

Menelisik Biang Kerok Pupuk Subsidi Langka

Kementerian Pertanian masih punya utang Rp 27 triliun kepada PT Pupuk Indonesia

Lailatul Anisah

JAKARTA. Kalangan petani mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi. Dari temuan di lapangan, biang kelangkaan pupuk subsidi adalah ketidaksesuaian di antara alokasi dan realisasi pupuk subsidi.

Komisi IV DPR RI menyoreti perbedaan angka di antara alokasi dan realisasi kontrak pupuk subsidi. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyebutkan, pada tahun 2023 Kementerian Pertanian (Kemtan) mengalokasikan volume pupuk subsidi sebanyak 7,85 juta ton. Namun berdasarkan kontrak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Pupuk Indonesia hanya terealisasi sebanyak 6,68 juta ton.

Tak pelak, perbedaan angka ini memicu kelangkaan pupuk subsidi di lapangan. Pasalnya, realisasi pupuk lebih rendah daripada janji Kemtan. 'Saya

punya datanya, berdasarkan alokasi 2023 ada 7,85 juta ton, sementara berdasarkan anggaran kontrak DIPA antara Pupuk Indonesia dan Kemtan jumlahnya cuma 6,68 juta ton, mana yang benar?', ujar Sudin dalam Raker Komisi IV DPR dan Kemtan, kemarin.

Merespons hal itu, Dirjen Prasarana dan Saranan Pertanian (PSP) Kemtan, Ali Jamil mengakui realisasi kontrak pupuk subsidi hanya 6,68 juta ton. Ia berdalih, kurangnya anggaran Kemtan menjadi penyebab realisasi pupuk subsidi lebih rendah dari alokasi. 'Karena kondisi anggaran kita cuma Rp 25 triliun, hanya mampu segitu untuk HPP pupuk subsidi,' kata dia.

Kemtan meminta tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan Pupuk Indonesia. Jadi, menurut Ali, alokasi pupuk subsidi 7,65 juta ton dapat

terrealisasi. 'Sebenarnya pupuk ini sudah disediakan teman-teman Pupuk Indonesia. Semoga dalam waktu dekat ada kabar dari Menteri Keuangan,' ujar Ali.

Pelunasan utang

Kemtan diketahui masih mempunyai utang ke PT Pupuk Indonesia senilai Rp 27 triliun untuk pengadaan pupuk subsidi 2020-2023. 'Ada piutang pupuk subsidi tahun 2020-2023 yang sudah diaudit BPK sebesar Rp 27 triliun, belum diajukan ke Kementerian Keuangan,' sebut Sudin.

Dia meminta Kemtan segera memproses pelunasan utang itu, sebab ia khawatir hal ini akan berefek pada produksi pupuk PT Pupuk Indonesia.

Ali menerangkan pihaknya dalam waktu dekat akan melunasi utang itu. Kemtan menargetkan utang akan segera dibayarkan dalam waktu dua

minggu. Menurut Ali, utang itu muncul lantaran ada kenaikan harga pupuk subsidi dari alokasi awal Kemtan. Jadi, ada penyesuaian alokasi anggaran di Kemtan.

Komisi VI DPR RI juga menagih janji Pupuk Indonesia terkait realisasi 1.000 kios pupuk nonsubsidi. Sudin bilang, sampai saat ini kios pupuk nonsubsidi masih 600 kios. 'Kenapa sih dipersulit? Dapat

laporan pupuk subsidi enggak dapat, tapi beli nonsubsidi susah,' jelas Sudin.

Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal bilang, pengembangan 1.000 kios pupuk nonsubsidi dilakukan dengan skema kemitraan *dealer owned dealer operated* (DODO). Skema ini ditawarkan ke perorangan maupun badan usaha yang punya kelengkapan izin usaha penjualan retail. ■

Alokasi Belanja Pupuk Subsidi (Rp triliun)

